



PORTRAIT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN EAST JAVA PROVINCE 2000-2012

Prayudi Setiawan Prabowo*¹ 

¹ Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find the relationship between compliance with HDI in East Java. With case study on Surabaya, Sidoarjo and Gresik. Where is expected to recover low HDI East Java in Java Island that year. The method to be used in this research is descriptive Quantitative research method. The first result, success in controlling the population both from the side of birth control and in-migration, will enable the achievement of a relatively low population density. As the population density diminishes, the government's education budget and health budget will have a more significant impact on improving education and public health. This will ultimately increase HDI, as education and health levels are a dimension in HDI measurement. Second, population control will increase income per capita. the income per capita (GRDP per capita) of GRDP is divided by the total population. With fewer populations, GDP per capita will tend to be higher. High income per capita will increase HDI growth.

Keywords: Human Development Index, Population Density, Gross Domestic Regional Bruto.

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
05 September 2017
Tanggal Revisi:
22 Oktober 2017
Tanggal Diterima:
19 November 2017
Tersedia Online
23 Desember 2017

*Korespondensi:
Prayudi Setiawan prabowo
E-mail:
prayudi.setiawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan dengan IPM di Jawa Timur. Dengan studi kasus di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Dimana diharapkan IPM Jawa Timur akan pulih rendah di Pulau Jawa pada tahun itu. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif Kuantitatif. Hasil pertama, keberhasilan pengendalian penduduk baik dari sisi pengendalian kelahiran maupun migrasi masuk, akan memungkinkan tercapainya kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan berkurangnya kepadatan penduduk, anggaran pendidikan dan kesehatan pemerintah akan berdampak lebih signifikan pada peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan IPM, karena tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Kedua, pengendalian penduduk akan meningkatkan pendapatan per kapita. pendapatan per kapita (PDRB per kapita) dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan populasi yang lebih sedikit, PDB per kapita akan cenderung lebih tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan HDI.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Kepadatan Penduduk, Bruto Regional Domestik Bruto.

JEL: O15; P42; O11.

Pendahuluan

Hingga tahun 2010 masih terjadi ketimpangan jumlah penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Persentase penduduk di Pulau Jawa terhadap total penduduk Indonesia mencapai 57,99 persen. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2009 Jawa Barat sebagai penyumbang angka penduduk terbesar di Pulau Jawa yaitu sebesar 17,94 persen, kedua Provinsi Jawa Timur dengan 16,12 persen, ketiga Jawa Tengah dengan 14,2 persen, keempat Banten dengan 4,23



persen, kelima DKI Jakarta dengan 3,99 persen dan terakhir DI Yogyakarta dengan 1,51 persen.

Konsentrasi penduduk sebesar 57,99 persen berada di pulau Jawa, yang hanya memiliki luas sebesar 129.438,28 Km², maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduknya sebesar 17.586 per Km² pada tahun 2009. Di mana DKI Jakarta merupakan Provinsi terpadat penduduknya dengan kepadatan penduduk 12.459 per Km², kemudian Jawa Barat sebesar 1.124 per Km², DI Yogyakarta sebesar 1.118 per Km², Banten 1.085 per Km², Jawa Tengah 1.002 per Km², dan Provinsi Jawa Timur sebesar 798 per Km². Pada tahun 2010 konsentrasi penduduk di pulau Jawa menjadi 57,83 persen dengan kepadatan 17.741 per Km².

Menurut data tersebut yang menarik untuk diketahui yakni, satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk di bawah 1000 jiwa per Km² hanyalah Provinsi Jawa Timur. Penduduk Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data BPS tahun 2009 sebesar 37 juta jiwa, di mana jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan 16 persen dari total penduduk Indonesia.

Tabel 1: Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
	2009	2010	2009	2010
DKI Jakarta	3,99	3,97	12459	12556
Jawa Barat	17,94	17,97	1124	1140
Banten	4,23	4,25	1085	1105
Jawa Tengah	14,2	14,13	1002	1009
DI Yogyakarta	1,51	1,51	1118	1128
Jawa Timur	16,12	16	798	803

Sumber : [Badan Pusat Statistik \(2010\)](#). Hasil olahan SUPAS 2005

Berdasarkan tabel 2; Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta sebesar 77,6; Provinsi Banten sebesar 70,48; Provinsi Jawa Barat sebesar 72,29; Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,77; Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,49; dan Provinsi Jawa Timur sebesar 71,62.

Dari data tersebut, perlu diperhatikan adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur hanya sebesar 71,62, di mana merupakan provinsi terendah kedua setelah Provinsi Banten di Pulau Jawa ditinjau dari nilai IPM. Sebagaimana kita tahu bahwa Provinsi Banten merupakan provinsi baru di Pulau Jawa ini, berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang sudah cukup lama berdiri.

Tabel 2: Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa

Provinsi	IPM 2010
DKI Jakarta	77,6
Banten	70,48
Jawa Barat	72,29
DI Yogyakarta	75,77
Jawa Tengah	72,49
Jawa Timur	71,62

Sumber: [Badan Pusat Statistik \(2012\)](#)

Karenanya perlu diketahui Faktor-faktor yang menjadikan IPM Provinsi Jawa Timur termasuk rendah, sebagaimana data yang terdapat pada tabel 1 bahwasanya Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya Provinsi yang tingkat kepadatannya di bawah angka 1000 jiwa/Km².

Di mana nantinya dapat dirumuskan kebijakan yang tepat di dalam upaya untuk meningkatkan IPM Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara kepadatan penduduk dengan IPM di Jawa Timur. Dengan studi kasus pada daerah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Di mana diharapkan dapat diidentifikasi penyebab rendahnya IPM Jawa Timur dibandingkan Provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun tersebut.

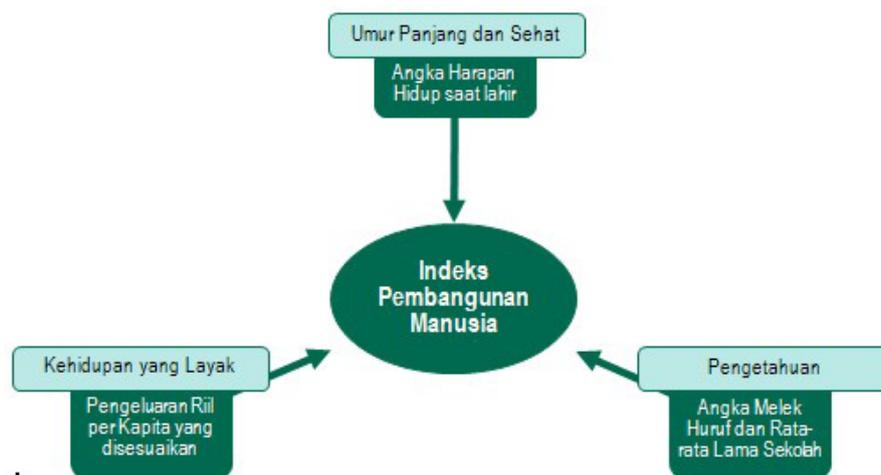
Landasan Teori

Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Di mana untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS).

Kepadatan Penduduk di Jawa Timur

Dengan penduduk yang berjumlah pada kisaran 37 juta jiwa, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Jawa setelah provinsi DKI Jakarta. Di mana dengan luas wilayah sebesar 47.156 Km², maka kepadatan penduduk Provinsi Jatim berkisar 788 jiwa/Km².



Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

Gambar 1: Diagram penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur yang berkisar pada angka 788 jiwa/Km² sebagaimana disebutkan di atas, merupakan angka kasar tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tercantum di dalam Tabel 1, tingkat kepadatan penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang bervariasi. Di mana Kota Surabaya merupakan daerah terpadat di Provinsi Jawa Timur, dengan kepadatan 7412 jiwa/Km². Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk terendah yakni Kabupaten Pacitan, dengan kepadatan 394 jiwa/Km².

Daerah yang memiliki kepadatan di atas 1000 jiwa/Km² adalah Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik dan Kota Batu. Sedangkan daerah yang kepadatannya di bawah 1000 jiwa/Km² adalah

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, kabupaten Lumajang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, kabupaten Pacitan. Di mana nantinya pembahasan akan difokuskan kepada daerah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Metode Penelitian

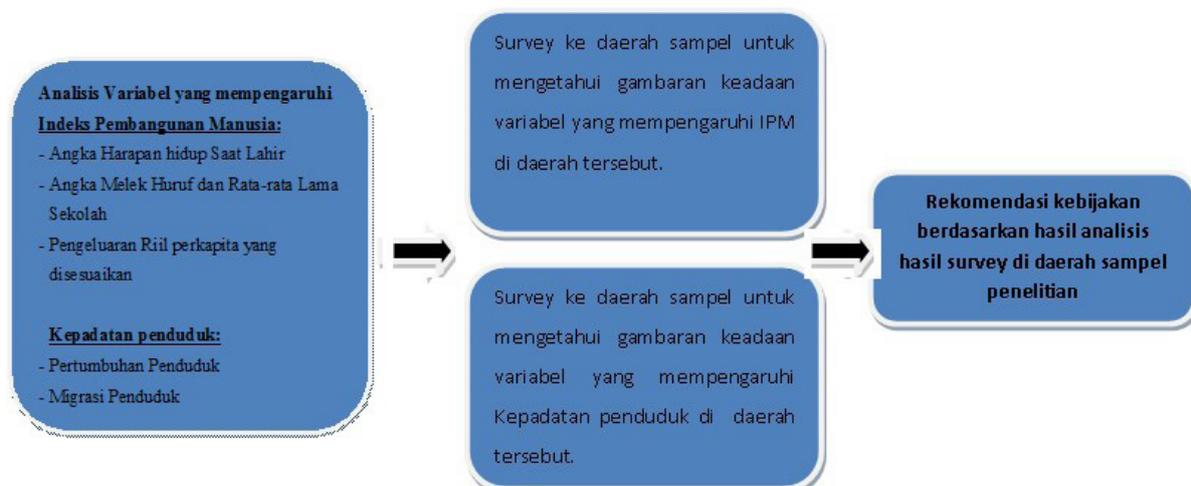
Metode yang akan digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian Kuantitatif Deskriptif. Di mana diharapkan dapat menjawab Faktor apa saja yang menjadikan IPM Provinsi Jawa Timur termasuk rendah, untuk kemudian dirumuskan kebijakan yang tepat di dalam upaya untuk meningkatkan IPM Provinsi Jawa Timur. Sehingga pada Akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di mana nantinya yang akan digunakan sebagai sampel adalah Kota Surabaya, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Kemudian Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik sebagai daerah yang memiliki tingkat kepadatan cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur yang berada di sekitar Kota Surabaya.

Data digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil survei kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait di daerah tersebut, dan juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan lembaga terkait lainnya.

Metode Analisis



Gambar 2: Diagram Alir Kerangka Kerja Penelitian

Adapun metode analisis yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengacu kepada kerangka kerja sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2. Di mana pada tahap analisis Variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan Kepadatan Penduduk, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Untuk kemudian tahap selanjutnya dilakukan survei ke daerah sampel penelitian, di mana survei dilakukan kepada SKPD yang berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi IPM dan kepadatan penduduk.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif tentang Kondisi Makro Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Surabaya

Kondisi Makro Ekonomi Kota Surabaya

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Surabaya menciptakan banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik migrasi masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Penelitian ini membuktikan bahwa Kota Surabaya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini menjadi faktor kedua yang diprediksi berpengaruh terhadap tingginya IPM Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan wilayah yang memiliki pendapatan per kapita yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Jawa Timur. PDRB per kapita Kota Surabaya ditunjukkan dalam tabel 3.

pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat juga tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat logis kalau Kota Surabaya yang memiliki pendapatan per kapita tinggi juga memiliki IPM yang tinggi pula.

Tabel 3: PDRB Per kapita dan Pendapatan Regional Per kapita Kota Surabaya

PDRB Per kapita dan Pendapatan Regional Per kapita Kota Surabaya Tahun 2000-2009	2000	2001	2002	2003	2004
Atas Dasar Harga Berlaku					
Produk Domestik Regional Bruto (000.000 Rp.)	46.954.358	53.715.710	61.153.149	68.551.838	79.708.058
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.)	17.929	20.400	23.100	25.768	29.730
Pendapatan Neto Terhadap Luar	–	–	–	–	–
Produk Regional Bruto (000.000 Rp.)	46.954.358	53.715.710	61.153.149	68.551.838	79.708.058
Produk Regional Bruto Per Kapita (000 Rp.)	17.929	20.400	23.100	25.768	29.730
Pendapatan Regional (000.000 Rp.)	40.825.650	46.711.126	53.205.334	59.573.254	69.530.782
Pendapatan Regional Per Kapita (000 Rp.)	15.589	17.740	20.098	22.393	25.934

Sumber: [Badan Pusat Statistik \(2000-2009\)](#)

Faktor kedua yaitu pendapatan *per kapita*. Sesuai Peraturan Gubernur Jatim No.72 Tentang Besaran UMK Kab/Kota di Jatim tahun 2015 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Surabaya menduduki posisi tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar Rp2.710.000. Nilai UMR

ini mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun 2014. Besarnya UMR kota Surabaya dalam periode penelitian ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4: UMR Kota Surabaya

Tahun	Umr	Tahun	Umr
2000	236.000	2008	805.500
2001	330.700	2009	948.500
2002	453.200	2010	1.031.500
2003	516.750	2011	1.115.000
2004	578.500	2012	1.257.000.
2005	655,500	2013	1.740.000
2006	685.500	2014	2.200.000
2007	746.000	2015	2.710.000

Sumber: Data UMR Kota Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa UMR kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. UMR yang tinggi memungkinkan masyarakat memiliki cukup dana untuk membiayai sekolah anak-anaknya sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka melek huruf cenderung semakin tinggi dan rata-rata lama sekolah cenderung semakin meningkat. Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya yang memiliki pendapatan per kapita tinggi juga memiliki IPM yang tinggi pula.

pendapatan per kapita yang tinggi juga memungkinkan masyarakat memiliki cukup dana untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka harapan hidup cenderung semakin meningkat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya yang memiliki pendapatan per kapita tinggi juga memiliki IPM yang tinggi pula. Selain itu tingginya IPM yang ditinjau dari aspek pendidikan dan kesehatan juga didukung oleh besarnya anggaran kesehatan dari pemerintah kota Surabaya. Dengan melihat Belanja Langsung Program Pendidikan dan Kesehatan pada pos Belanja Langsung APBD kota Surabaya, proporsi belanja Langsung Program Pendidikan dan Kesehatan selama 3 tahun rata-rata sebesar 28,42% terhadap total belanja, dan mempunyai pertumbuhan rata-rata relatif besar, maka dengan kondisi seperti ini kebijakan anggaran pemerintah kota Surabaya sudah pada arah yang tepat sesuai dengan amat undang-undang yang mengharuskan daerah mengalokasikan minimal 20 persen dari total APBD untuk anggaran pendidikan. Belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Surabaya

Besarnya anggaran pendidikan dan kesehatan ditunjukkan pada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 tersebut, terlihat bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan salah satu indikator dalam tercapainya IPM tinggi di Kota Surabaya.

Tabel 5: Anggaran Pendidikan Serta Kesehatan Surabaya (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Kesehatan	Pendidikan
2000	7.906,91	5.288,79
2001	6.491,32	2.255,89
2002	9.670,61	13.911,98
2003	23.759,87	35.365,76
2004	-	-
2005	-	-
2006	82.525	436.443
2007	91,532	108,354
2008	161577	576.021
2009	249.994	774.569
2010	312.014	901.866
2011	557.292	1.544.994
2012	716.914	1.470.439

Analisis Deskriptif tentang Kondisi Makro Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik

Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gresik

Wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan menarik migrasi masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 1017 jiwa per Km² pada tahun 2009.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang telah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat juga tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan kecenderungan angka IPM yang tinggi pula.

Korelasi di antara variabel-variabel tersebut juga terjadi di Kabupaten Gresik. PDRB per kapita Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dari Rp. 13,76 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 14,85 juta pada tahun 2012. Lihat Tabel 6. Angka IPM Kabupaten Gresik mencapai 75,97 pada tahun 2012, lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Timur yang hanya 72,83. Angka IPM di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan dari 66,4 tahun 2000 menjadi 75,97 pada tahun 2012. Kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan mencapai 1017 jiwa per Km² pada tahun 2009.

Tabel 6: PDRB Per Kapita dan IPM Kabupaten Gresik (%)

Tahun	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	IPM
2010	13,76156425	74,47
2011	15,27547396	75,17
2012	14,85033322	75,97

Gambaran data ini memberikan penegasan bahwa pendapatan per kapita yang semakin tinggi meningkatkan angka IPM. Namun demikian, pendapatan per kapita yang tinggi

yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang telah menarik migrasi masuk sehingga pertumbuhan penduduk cenderung tinggi dan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan.

Naiknya pendapatan per kapita salah satunya disumbang oleh kenaikan pendapatan kelompok buruh yang diindikasikan oleh meningkatnya UMR. Tabel 7 memperlihatkan bahwa UMR kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam periode 2000-2012, dari Rp. 300.000,- pada tahun 2000 menjadi 1.257.000,- pada tahun 2012. Dalam kurun waktu 12 tahun, UMR telah mengalami peningkatan 4 kali lipat. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan UMR di Kota Surabaya.

Tabel 7: Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Gresik

Tahun	UMR
2000	300.000
2001	330.000
2002	453.000
2003	516.500
2004	516.500
2005	578.250
2006	655.200
2007	734.500
2008	803.652
2009	971.624
2010	1.010.400
2011	1.133.000
2012	1.257.000

Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Gresik

Dua indikator tingkat pendidikan yang menjadi salah satu dimensi dalam IPM adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Perkembangan kedua indikator tersebut di Kabupaten Gresik tampak pada Tabel 8. Terlihat bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam periode 2000-2012, diindikasikan oleh naiknya angka melek huruf dari 91,3 menjadi 96,17 dan naiknya rata-rata lama sekolah dari 7,6 tahun menjadi 8,98 tahun.

Tabel 8: Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik

Tahun	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah
2000	91,3	7,6
2001	91,3	7,6
2002	90,7	7,4
2003	90,7	7,4
2004	91,83	7,79
2005	92,6	8,1
2006	94	8,4
2007	94,04	8,4
2008	94,04	8,4
2009	94,36	8,49

Tahun	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah
2010	94,47	8,53
2011	94,56	8,84
2012	96,17	8,98

Sumber: BPS Jatim

Makin besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat seiring dengan naiknya pendapatan per kapita, membuat masyarakat memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Hal itu, juga ditunjang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan, sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang semakin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan angka melek huruf semakin tinggi dan rata-rata lama sekolah juga semakin meningkat.

Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Kabupaten Gresik yang memiliki pendapatan per kapita yang semakin tinggi juga memiliki IPM yang semakin tinggi pula.

Selain peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia di bidang pendidikan tersebut tercermin dari peningkatan anggaran pendidikan Kabupaten Gresik dalam periode 2000-2012. Peningkatan anggaran pendidikan yang spektakuler terjadi pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 104.657,35 juta dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp. 3.627,24 juta atau mengalami peningkatan lebih dari 28 kali. Anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan mencapai Rp. 516,1 juta pada tahun 2012.

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik

Pendapatan masyarakat yang semakin tinggi juga menyebabkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk dapat memperoleh layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, yang salah satunya diindikasikan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Gresik. Angka harapan hidup di Kabupaten Gresik telah mengalami peningkatan dari 67,3 tahun pada tahun 2000 menjadi 71,22 pada tahun 2011. Kenaikan tersebut, selain disebabkan oleh naiknya pendapatan serta kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan, juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah meningkatkan alokasi anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengalami peningkatan yang spektakuler pada tahun 2003 sebesar Rp 34.588 juta dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp. 3.831 juta atau mengalami kenaikan 9 kali. Anggaran kesehatan terus mengalami kenaikan mencapai Rp. 185.572 juta.

Anggaran kesehatan di Kabupaten Gresik memegang peranan penting dalam upaya memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Sebagai kota industri, tingkat polusi di Kabupaten Gresik tergolong tinggi dan hal ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi akut pernafasan menempati peringkat ketiga sebagai penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di Kota Gresik dengan 2.682 kasus pada tahun 2010. Semakin banyaknya penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat polusi, tentu membutuhkan dana kesehatan yang semakin besar untuk pengobatannya.

Peningkatan alokasi anggaran kesehatan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan antara lain terkait dengan Posyandu dan Puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2010, pelayanan Imunisasi di Puskesmas-puskesmas Kabupaten Gresik secara umum telah melampaui target yang ditetapkan, walaupun di beberapa puskesmas masih di bawah 100 persen dengan Capaian tertinggi ialah jenis imunisasi DPT HB *Combo* 3 yang mencapai 117,43 persen. Hal ini didukung dengan jumlah Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKD pada tahun 2010 masing-masing sebanyak 356 orang dan 2.854 orang. Jumlah klinik KB tahun 2010 mencapai 123 buah. Jumlah PUS pada tahun 2010 sebanyak 228.454 orang dengan jumlah peserta KB aktif 180.331 pasangan. Alat kontrasepsi tertinggi adalah Suntik (60,51 persen), Pil (22,01 persen), Susuk (7,52 persen) dan IUD (5,67 persen). Realisasi perkiraan permintaan masyarakat tahun 2010 jauh di bawah target yaitu hanya 8,88 persen. Pada tahun 2010, jumlah keluarga yang masuk kategori kelompok keluarga sejahtera I sejumlah 45.031 keluarga, kategori keluarga sejahtera II sejumlah 64.511 keluarga, keluarga sejahtera III sejumlah 131.384 keluarga dan keluarga sejahtera III plus hanya 13.026 keluarga.

Anggaran kesehatan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk, tentunya membutuhkan ketersediaan RSUD dan Puskesmas sebagai tempat layanan kesehatan dalam jumlah yang semakin banyak. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan anggaran kesehatan yang semakin besar.

Jumlah peserta KB aktif yang semakin meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengatur jarak kelahiran. Dengan kualitas kesehatan yang semakin baik diharapkan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan tingkat produktivitas yang semakin tinggi, sehingga dapat mencapai kehidupan yang semakin sejahtera.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konkret dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dalam arti bahwa kodrat manusia sebagai makhluk hidup pasti mempunyai keinginan untuk hidup lebih layak dan nyaman yang berarti mereka akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban apabila manusia selalu berupaya mencari pekerjaan yang layak dan menginginkan peningkatan penghasilan. Melalui peningkatan penghasilan yang mereka terima, kebutuhan hidup yang layak akan dapat dipenuhi, sehingga mereka mengalami peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dibarengi dengan membaiknya derajat pendidikan dan kesehatan, pada akhirnya akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, secara internal, setiap manusia akan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, Peningkatan kesejahteraan hidup yang dialami oleh masyarakat di suatu daerah pada akhirnya akan terindikasi oleh peningkatan nilai IPM.

Sedangkan konsep eksternal menjelaskan bahwa upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia merupakan tugas pemerintah yang di setiap program pembangunan yang dilaksanakan selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan salah satunya diindikasikan oleh tingkat IPM yang semakin tinggi.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut, harus ada upaya untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk suatu daerah. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang semakin berimbang (terkendali) akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gresik memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dalam kisaran 1,5% sampai dengan 2% per tahun. Nilai ini tidak boleh dianggap remeh karena dengan melihat kompleksitas perkembangan wilayah

Gresik yang semakin padat dengan pertumbuhan industri, akan mempersempit area yang layak untuk hunian dan menyulitkan penataan lingkungan secara sehat.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, berbagai upaya pemerintah kabupaten Gresik dalam program kesehatan telah diarahkan agar dapat mendukung pencapaian IPM yang makin tinggi. Alokasi dana kesehatan yang dianggarkan Kabupaten Gresik mulai tahun 2000 mengalami peningkatan yang tinggi hampir 200% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten Gresik untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, di antaranya melalui perbaikan taraf kesehatan masyarakat. Berbagai program perbaikan kesehatan telah dilakukan, di antaranya pendirian polindes di setiap desa yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu hamil, pemberian asupan gizi balita, bantuan perbaikan MCK/perbaikan jamban keluarga, bantuan pengobatan keluarga, Gakin, serta penyuluhan dan pendampingan bagi keluarga prasejahtera.

Upaya program kesehatan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup yang lebih panjang pada masyarakat Gresik. Di samping itu, peningkatan angka harapan hidup tersebut juga mengindikasikan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat untuk berperilaku sehat. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat pada akhirnya dapat memperlambat terjangkitnya wabah penyakit menular dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan lebih dini terhadap suatu penyakit. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat tersebut juga turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka harapan hidup saat lahir, menurunnya tingkat kematian ibu hamil, balita serta penurunan wabah penyakit menular bagi masyarakat prasejahtera dan sejahtera.

Alokasi dana kesehatan akan semakin memberikan makna yang lebih jika jumlah penduduk dapat dikendalikan. Melalui pengendalian jumlah penduduk, maka program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan semakin beragam variannya dan porsi penerimaan masyarakat juga akan semakin tinggi.

Analisis Deskriptif tentang Kondisi Makro Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sempat mengalami penurunan sejak munculnya kasus lumpur Lapindo. Namun demikian, saat ini sudah terjadi pemulihan kegiatan ekonomi diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Perekonomian Sidoarjo yang kembali bangkit turut andil dalam penciptaan lapangan kerja. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor angkutan dan komunikasi. Wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi akan menarik migrasi masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 2522 jiwa per Km² pada tahun 2009.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang sempat mengalami penurunan sejak kasus lumpur Lapindo cenderung menurunkan pendapatan rata-rata masyarakat yang diindikasikan oleh menurunnya PDRB per kapita selama periode 2005-2010 dari Rp. 13,9 juta menjadi Rp. 12,8 juta pada tahun 2010. Namun demikian angka IPM dalam periode yang sama secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dari 73,98 pada tahun 2005 menjadi 76,35 pada tahun 2010.

Ada beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, *pertama*, walaupun pendapatan per kapita mengalami penurunan, namun pengeluaran riil per kapita masyarakat Sidoarjo masih mengalami kenaikan semenjak munculnya kasus lumpur Lapindo. Hal ini disebabkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di sektor formal mereka masuk sektor informal sehingga mampu bertahan dan bahkan mampu meningkatkan pendapatannya. Oleh karena itu, pengeluaran riil per kapita masyarakat Sidoarjo masih mengalami peningkatan. Nilai pendapatan yang diciptakan oleh sektor informal tidak masuk catatan pemerintah, sehingga PDRB per kapita terlihat mengalami penurunan. Padahal pendapatan rata-rata masyarakat secara riil masih mengalami peningkatan. *Kedua*, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membawa dampak peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang merupakan dimensi IPM. Meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran riil per kapita masyarakat tentu saja meningkatkan nilai IPM.

Tabel 9: PDRB Per Kapita dan IPM Kabupaten Sidoarjo (%)

Tahun	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	IPM
2005	13,94743	73,98
2006	14,37798	74,54
2007	14,75464	74,87
2008	13,00809	75,35
2009	12,91069	75,88
2010	12,75733	76,35
2011	13,39929	76,90

Dalam tahun 2011, terjadi kenaikan baik angka PDRB per kapita maupun IPM masing-masing Rp. 13,4 juta dan 76,90. Lihat Tabel 9. Hal ini menjadi salah satu indikasi pulihnya ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari dampak negatif kasus lumpur Lapindo. Beberapa produk unggulan Kabupaten Sidoarjo bahkan semakin berkembang, seperti tas dan sepatu Tanggulangin, Batik, dan sebagainya.

Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Dua indikator tingkat pendidikan yang menjadi salah satu dimensi dalam IPM adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Perkembangan kedua indikator tersebut di Kabupaten Sidoarjo tampak pada Tabel 10. Terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dalam periode 2000-2012, diindikasikan oleh naiknya angka melek huruf dari 95,4 menjadi 97,79 dan naiknya rata-rata lama sekolah dari 8,8 tahun menjadi 9,92 tahun.

Walaupun terkena dampak negatif kasus lumpur Lapindo, pengeluaran riil per kapita masyarakat Sidoarjo masih mengalami peningkatan. Salah satu jenis pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk pendidikan. Dengan demikian pengeluaran masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk pendidikan masih mengalami kenaikan. Fakta inilah yang mendukung jawaban kenapa derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo senantiasa mengalami peningkatan, sekalipun terjadi kasus lumpur Lapindo.

Hal ini juga ditunjang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan, sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut berkeinginan menem-puh pendidikan yang semakin tinggi. Akibatnya, angka melek huruf semakin tinggi dan ra-

ta-rata lama sekolah juga semakin meningkat. Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki pengeluaran riil per kapita yang semakin tinggi juga memiliki IPM yang semakin tinggi pula.

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo juga disebabkan oleh meningkatnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semakin besarnya alokasi anggaran pendidikan dapat berdampak pada peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan derajat pendidikan masyarakat.

Tabel 10: Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah
2000	95,4	8,8
2001	95,4	8,8
2002	96	9,4
2003	96	9,4
2004	96,63	9,3
2005	97,3	9,5
2006	97,4	9,5
2007	97,37	9,49
2008	97,37	9,49
2009	97,4	9,78
2010	97,42	9,84
2011	97,76	9,85
2012	97,79	9,92

Sumber: BPS Jatim

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Pengeluaran riil per kapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang semakin tinggi juga menyebabkan masyarakat memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk dapat memperoleh layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan, yang salah satunya diindikasikan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo. Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami peningkatan dari 67,9 tahun pada tahun 2000 menjadi 70,79 pada tahun 2011. Kenaikan tersebut, selain disebabkan oleh naiknya pengeluaran riil per kapita juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia.

Pembahasan

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara IPM dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Jawa Timur. Kerangka pemikiran tentang keterkaitan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa dalam upaya peningkatan IPM, peran penting dari pengendalian penduduk tidak boleh diabaikan. Sebagaimana diungkapkan Salim (2011) bahwa upaya penurunan fertilitas melalui pengendalian penduduk ternyata sangat berkontribusi besar terhadap pencapaian IPM. Dalam kaitan dengan pendidikan, keluarga dengan

anak sedikit dan jarak kelahiran yang lebar akan memungkinkan mereka berinvestasi untuk pendidikan anaknya.

Dengan kerangka pemikiran seperti itu, pengendalian jumlah penduduk akan dapat menaikkan nilai IPM di suatu daerah. Dengan perkataan lain, daerah yang berhasil melakukan pengendalian penduduk yang diindikasikan oleh relatif rendahnya tingkat kepadatan penduduk akan cenderung memiliki IPM yang tinggi, sementara daerah lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi cenderung memiliki IPM yang rendah. Hal inilah yang melahirkan dugaan (hipotesis) yang menyatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk memiliki korelasi yang negatif dengan IPM.

Namun demikian, hipotesis seperti itu tidak terbukti dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa daerah penelitian (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik) adalah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan sekaligus memiliki nilai IPM yang tinggi. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. *Pertama*, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo kendati sempat mengalami penurunan pertumbuhan akibat kasus lumpur Lapindo, namun saat ini sudah mengalami pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terutama didukung oleh perkembangan sektor jasa. Sementara di wilayah Sidoarjo dan Gresik, sektor industri memiliki sumbangan yang cukup besar dalam pertumbuhan PDRB wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik migrasi masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula. Penelitian ini membuktikan bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan Kabupaten Sidoarjo yang sudah mengalami pemulihan ekonomi, juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, memiliki pendapatan per kapita yang semakin tinggi. Kabupaten Sidoarjo, kendati sempat mengalami penurunan PDRB per kapita, namun memiliki pengeluaran riil per kapita yang semakin meningkat. Pendapatan per kapita yang tinggi menyebabkan rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat juga tinggi. Rata-rata pengeluaran riil per kapita menjadi salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat logis kalau Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik memiliki IPM yang semakin tinggi pula.

Ketiga, pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) yang semakin tinggi memungkinkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai sekolah anak-anaknya sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka melek huruf cenderung semakin tinggi dan rata-rata lama sekolah akan cenderung semakin meningkat. Dua indikator tersebut (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, sangat mudah untuk dipahami bahwa wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) juga memiliki IPM yang tinggi pula.

Keempat, pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) juga memungkinkan masyarakat memiliki cukup dana untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga memungkinkan masyarakat di wilayah tersebut memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa angka harapan hidup cenderung semakin meningkat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator dalam pengukuran IPM. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) cenderung memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini terbukti bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang memiliki pendapatan per kapita tinggi (pengeluaran riil per kapita tinggi) juga memiliki IPM yang tinggi pula.

Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, juga memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini tidak berarti bahwa pengendalian jumlah penduduk bukan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Pengendalian penduduk tetap saja merupakan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. *Pertama*, keberhasilan dalam pengendalian penduduk baik dari sisi pengendalian tingkat kelahiran maupun migrasi masuk, akan memungkinkan dicapainya tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan semakin berkurangnya tingkat kepadatan penduduk, maka anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Alasannya, dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit, maka anggaran per kapita akan semakin tinggi, sehingga semakin efektif dalam meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan. Jika hal ini dapat dilakukan pada akhirnya akan meningkatkan nilai IPM, karena tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan dimensi dalam pengukuran IPM.

Kedua, pengendalian jumlah penduduk akan cenderung menaikkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita) diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit, angka PDRB per kapita akan cenderung semakin tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan cenderung meningkatkan nilai IPM.

Kedua argumentasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengendalian jumlah penduduk merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan IPM. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dalam rangka pengendalian penduduk. *Pertama*, pengendalian tingkat kelahiran harus lebih intensif dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Upaya penyadaran masyarakat akan arti pentingnya program KB harus lebih digalakkan. Upaya ini memerlukan dukungan perbaikan fasilitas pelayanan KB dan tenaga medis yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Gresik, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kedua, perlu ada upaya untuk menurunkan migrasi masuk ke wilayah kabupaten/kota yang padat penduduk, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan migrasi di wilayah ini:

1. Percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal di Jawa Timur, yang umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Adanya wilayah yang makmur diindikasikan oleh pendapatan per kapita yang tinggi dan wilayah lain yang relatif miskin diindikasikan oleh pendapatan per kapita yang rendah merupakan gambaran

ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. Ketimpangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur. Migrasi akan mengalir dari wilayah yang pendapatan per kapitanya rendah ke wilayah lain yang pendapatan per kapitanya tinggi. Oleh karena itu, perlu ada upaya pemerataan pembangunan antar wilayah.

2. Dalam rangka mengurangi migrasi masuk khususnya ke wilayah Kota Surabaya, harus ada upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membatasi jumlah penduduk yang menetap di Kota Surabaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat persyaratan bagi pendatang baru yang ingin mengurus KTP di Kota Surabaya.
3. Migrasi masuk khususnya ke kota besar seperti Surabaya dan kota penyangganya (Sidoarjo dan Gresik) merupakan fenomena urbanisasi. Solusi yang efektif dalam menurunkan tingkat urbanisasi adalah pembangunan desa. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan harus lebih ditingkatkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya pemerintah untuk memberikan alokasi dana anggaran yang makin besar terhadap pemerintahan desa patut diberikan apresiasi. Namun demikian, yang lebih menentukan keberhasilan dalam peningkatan pembangunan di desa, bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Oleh karena itu, implementasi dalam penyaluran anggaran tersebut memerlukan aktivitas pendampingan dan pengawasan secara intensif dan ketat.

Kesimpulan

1. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena tersebut. *Pertama*, wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menarik migrasi masuk, akibatnya tingkat kepadatan penduduk menjadi semakin tinggi. Demikian juga kabupaten Sidoarjo yang sudah mengalami pemulihan ekonomi pasca kasus lumpur Lapindo, juga cenderung menarik migrasi masuk ke wilayah ini, akibatnya tingkat kepadatan penduduk juga semakin tinggi. *Kedua*, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) masyarakat. Peningkatan pengeluaran riil per kapita pada akhirnya berdampak meningkatkan IPM. *Ketiga*, pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) yang semakin tinggi memungkinkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai pendidikan. Hal ini mengakibatkan tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi dan nilai IPM makin tinggi pula. *Keempat*, pendapatan per kapita (pengeluaran riil per kapita) yang semakin tinggi memungkinkan masyarakat memiliki dana yang lebih besar untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik. Hal ini mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat semakin tinggi dan nilai IPM makin tinggi pula.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, juga memiliki IPM yang tinggi pula. Hal ini tidak berarti bahwa pengendalian jumlah penduduk bukan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Pengendalian penduduk tetap saja merupakan sesuatu yang penting dalam upaya peningkatan nilai IPM. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan. *Pertama*, keberhasilan dalam pengendalian penduduk baik dari sisi pengendalian tingkat kelahiran maupun migrasi masuk, akan memungkinkan dicapainya tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Dengan semakin berkurangnya tingkat kepadatan penduduk, maka anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan

dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan nilai IPM, karena tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan dimensi dalam pengukuran IPM. *Kedua*, pengendalian jumlah penduduk akan cenderung menaikkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita) diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit, angka PDRB per kapita akan cenderung semakin tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi akan cenderung meningkatkan nilai IPM. Kedua argumentasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengendalian jumlah penduduk merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan IPM.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2000). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2001). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2002). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2003). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Survey Penduduk Antar Sensus*. Badan Pusat Statistik.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. edisi Ke-3. UPP AMP YKPN.
- Putri, I. K. K. (2014), *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perbankan Syariah terhadap Kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia) di Indonesia pada Tahun 2010-2012* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Resosudarmo, B. P., & Vidyatama, Y. (2004). "Regional Pendapatan Disparity in Indonesia: A panel Data Analysis". Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Regional Science (IRSA) ke-6.